

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena anak jalanan merupakan masalah sosial yang tidak hanya terjadi secara lokal, melainkan juga bersifat global dan multidimensional. Anak-anak jalanan di berbagai negara sering kali menghadapi marginalisasi sosial yang berat, kekerasan fisik maupun psikologis, serta eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk pekerja anak dan perdagangan manusia. Selain itu, mereka juga mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai. Kondisi ini memperparah ketidakberdayaan mereka dan menghambat peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketidakamanan (Mogwanja, 2023; UNICEF, 2019).

Fenomena anak jalanan di Indonesia semakin mengkhawatirkan seiring pesatnya urbanisasi dan meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Sosial, terdapat sekitar 4,1 juta anak telantar di Indonesia, mencerminkan kondisi ketimpangan sosial yang signifikan (Kementerian Sosial, 2020). Proses urbanisasi yang cepat menyebabkan ledakan jumlah penduduk di kota-kota besar tanpa diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja dan perumahan yang memadai (CPPS UGM, 2020). Akibatnya, banyak keluarga miskin yang memanfaatkan tenaga anak-anak mereka untuk bekerja di sektor informal, seperti mengemis dan mengamen, sebagai strategi bertahan hidup dalam menghadapi krisis ekonomi keluarga (Garuda, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa urbanisasi dan ketimpangan sosial-ekonomi berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya jumlah anak jalanan di Indonesia (Kementerian Sosial, 2020).

Fenomena anak jalanan di Kota Makassar merupakan permasalahan sosial yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi khas wilayah tersebut. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Makassar tidak terkecuali dalam menghadapi tantangan ini. Berdasarkan data yang tersedia, kondisi anak jalanan di Kota Makassar menunjukkan tren yang fluktuatif, meskipun tetap menjadi permasalahan sosial yang nyata. Misalnya, pada periode Januari–September 2022, tercatat sebanyak 375 anak jalanan yang "berkeliraran" menurut pendataan Dinas Sosial Kota Makassar, disertai dengan 139 pengemis (Herald, 2022). Sebelumnya, data penelitian menyebutkan bahwa pada 2019 jumlah anak jalanan tercatat sebanyak 191 orang, yang kemudian meningkat pada 2020 menjadi 268 orang (Jurnal Unismuh, 2020). Data lain dari dashboard Kota Makassar menyebutkan bahwa jumlah anak jalanan pada tahun 2022 mencapai 501 orang (Satu Data Kota Makassar, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2019–2024), jumlah anak jalanan di Makassar tidak menunjukkan penurunan yang konsisten, dengan adanya lonjakan dan penurunan tetapi tetap berada pada angka ratusan orang tiap tahun, mengindikasikan bahwa upaya penanganan belum dapat secara tuntas mereduksi fenomena tersebut.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk menangani fenomena anak jalanan, termasuk dengan menyediakan Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) sebagai pusat rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan fisik, mental, serta sosial bagi anak jalanan (Herald, 2022). Selain itu, Dinas Sosial juga telah membentuk sembilan posko pengawasan terpadu dan melakukan patroli rutin di titik rawan, serta mengedukasi masyarakat untuk tidak memberi uang langsung kepada anak jalanan di jalanan (Satu Data Kota Makassar, 2022). Meskipun upaya tersebut telah menunjukkan kemajuan, dengan tercatatnya 99 anak jalanan yang telah direhabilitasi pada tahun 2024, kondisi yang terjadi saat ini masih menunjukkan tantangan signifikan. Banyak anak jalanan yang kembali ke jalanan meskipun telah melalui program pembinaan, yang mengindikasikan

bahwa program tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka anak jalanan (Jurnal Unismuh, 2020). Penelitian juga menyebutkan bahwa kendala struktural seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus dan koordinasi antarinstansi menjadi hambatan dalam menciptakan solusi jangka panjang bagi anak jalanan di Makassar (CPPS UGM, 2020). Oleh karena itu, meskipun upaya pemerintah telah memberikan dampak positif, diperlukan penguatan fasilitas dan koordinasi yang lebih intensif untuk mencapai hasil yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut penelitian (Kamrin, 2022), faktor ekonomi atau kemiskinan menjadi penyebab dominan munculnya anak jalanan, di mana mereka terpaksa mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga atau diri mereka sendiri. Selain itu, faktor keluarga dan masyarakat juga turut berperan, seperti disfungsi keluarga dan lingkungan sosial yang kurang mendukung, yang membuat anak-anak ini terpaksa hidup di jalanan untuk bertahan hidup. Anak jalanan di Makassar dapat dikategorikan menjadi tiga tipe, yaitu *children on the street*, *children of the street*, dan *children from families of the street*, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat keterikatan mereka dengan keluarga dan aktivitas di jalanan (Rohmah, 2023). Anak jalanan yang tidak terbina, yang tidak tersentuh oleh kelompok komunitas anak jalanan, lebih rentan terhadap kekerasan fisik dan psikologis serta kurang mendapatkan dukungan sosial yang memadai untuk perlindungan mereka.

Sebaliknya, anak jalanan yang terbina oleh kelompok komunitas memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah dan lebih mampu beradaptasi dengan kondisi jalanan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat dalam penanganan masalah anak jalanan di Makassar. (Syarif, 2024) menekankan bahwa pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap kondisi sosial budaya setempat menjadi kunci dalam keberhasilan penanggulangan fenomena ini. Hal ini mencakup tidak hanya intervensi sosial, tetapi juga pembenahan ekonomi dan dukungan dari komunitas lokal untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi anak-anak jalanan di Makassar.

Perilaku anak jalanan di Makassar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik individu, keluarga, sosial, maupun ekonomi. Anak-anak yang hidup di jalanan sering kali menunjukkan perilaku yang adaptif terhadap kondisi lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Mereka belajar untuk bertahan hidup melalui mekanisme coping yang bersifat sementara namun efektif, seperti mengemis, mengamen, atau terlibat dalam kegiatan ilegal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut penelitian (Suryani, 2020), anak jalanan seringkali menunjukkan sikap agresif dan mudah terlibat dalam konflik akibat ketidakstabilan emosi dan trauma psikologis yang mereka alami. Selain itu, pengaruh negatif dari pergaulan di jalanan juga meningkatkan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam perilaku menyimpang seperti kekerasan, penyalahgunaan zat, dan kriminalitas.

Hal ini diperkuat oleh penelitian dari (Wulandari, 2019), yang menunjukkan bahwa anak jalanan memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi akibat kondisi hidup yang tidak stabil dan seringkali berisiko tinggi. Perilaku ini sebagian besar berakar dari ketidakmampuan anak-anak untuk mengakses pendidikan yang layak dan peran serta dalam struktur sosial yang mendukung perkembangan mereka secara positif. Menurut (Suhartono, 2021), faktor-faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidakmampuan keluarga untuk memberikan perhatian yang cukup, memperburuk kondisi mental dan fisik anak-anak ini, yang menyebabkan mereka lebih rentan terhadap penyimpangan perilaku. Dalam konteks ini, dibutuhkan peran aktif dari organisasi sosial, lembaga pemerintah, serta komunitas lokal untuk menyediakan intervensi yang dapat mengarahkan anak-anak jalanan untuk mengalami transformasi perilaku yang lebih positif dan mengurangi kerentanannya terhadap eksploitasi lebih lanjut.

Peran komunitas sebagai agen perubahan sosial sangat penting dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, termasuk di Kota Makassar. Komunitas memiliki kapasitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perubahan perilaku anak jalanan melalui berbagai pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Menurut (Arifin, 2021), komunitas yang inklusif dapat memberikan ruang bagi anak jalanan untuk merasakan rasa aman dan memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan sosial yang lebih baik, yang sangat penting untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka.

Komunitas yang mengutamakan komunikasi yang terbuka dan empatik, serta menghargai hak-hak anak, memungkinkan anak jalanan untuk merasa dihargai dan diterima, sehingga mereka lebih terbuka terhadap intervensi sosial yang ditawarkan. Selain itu, penelitian oleh (Fadli, 2020) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam program-program sosial berbasis pemberdayaan mampu meningkatkan kepercayaan diri dan aspirasi anak jalanan, yang berujung pada perubahan positif dalam perilaku mereka. Komunitas juga berperan dalam menciptakan jejaring sosial yang dapat membantu anak-anak tersebut untuk kembali ke jalur kehidupan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, penelitian oleh Susanti (2022) menegaskan bahwa relawan dan organisasi sosial yang berfokus pada komunitas memiliki peran kunci dalam memperkenalkan nilai-nilai sosial yang lebih sehat dan memberikan alternatif kegiatan yang lebih produktif bagi anak jalanan. Keterlibatan komunitas yang bersifat kolaboratif, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum, adalah langkah strategis untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas bagi anak-anak jalanan di Makassar.

Komunitas Peduli Anak Jalanan Makassar (KPAJ) telah berperan penting dalam memberikan bantuan sosial dan pendidikan kepada anak-anak jalanan di Kota Makassar. Sebagai salah satu organisasi sosial yang fokus pada pemberdayaan anak jalanan, KPAJ berkomitmen untuk mengubah kondisi kehidupan anak-anak tersebut melalui pendekatan yang berbasis pada kesejahteraan fisik dan psikososial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kamrin, 2022), KPAJ telah berhasil mengimplementasikan program-program yang memberikan pendidikan non-formal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikologis bagi anak jalanan.

Hal ini bertujuan untuk membantu mereka memperoleh keterampilan hidup yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada jalanan sebagai sumber penghidupan. Selain itu, penelitian oleh (Syarif, 2024) menambahkan bahwa KPAJ juga aktif dalam menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan program mereka, serta memperluas jangkauan bantuan yang mereka berikan kepada anak-anak jalanan. Keterlibatan komunitas ini menciptakan jaringan dukungan yang kuat, baik dari relawan, masyarakat, maupun pemerintah, yang membantu meningkatkan peluang anak-anak jalanan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menurut data dari (Kementrian Sosial, 2020), keberadaan komunitas seperti KPAJ sangat penting dalam mendukung upaya rehabilitasi sosial anak jalanan, karena mereka menyediakan akses kepada layanan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh anak-anak tersebut, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya komunitas seperti KPAJ, transformasi perilaku anak jalanan dapat tercapai melalui pendekatan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Seiring berkembangnya kajian di bidang komunikasi sosial, tren penelitian terbaru menekankan pentingnya adaptasi komunikasi yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial lokal. Hal ini bertujuan agar interaksi antara relawan dan anak jalanan dapat berlangsung secara lebih autentik dan bermakna, dengan memperhatikan latar belakang budaya, nilai, dan norma yang melekat pada komunitas tersebut (Knight, 2022; Rahman, 2024), Studi oleh (Sari, 2023)

mendukung pandangan ini dengan menemukan bahwa komunikasi yang mempertimbangkan konteks budaya lokal memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan partisipasi anak jalanan dalam program pemberdayaan. Dengan demikian, penggunaan model komunikasi yang adaptif terhadap keunikan budaya setempat menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan intervensi sosial.

Komunikasi yang tepat dapat membantu membangun hubungan yang kuat antara relawan dan anak jalanan. (Puruhito, 2019) dan (Alam dkk., 2021), menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang melibatkan dialog terbuka, empati, serta penghargaan terhadap pengalaman hidup anak jalanan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Hal ini juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh (Knight, 2022), yang menyoroti pentingnya komunikasi berbasis empati dalam konteks intervensi sosial pada kelompok marjinal.

Model komunikasi yang digunakan harus mampu memahami kondisi emosional dan latar belakang sosial yang beragam, sekaligus memperhatikan trauma dan pengalaman hidup yang membentuk sikap dan perilaku anak jalanan. Komunikasi yang adaptif tidak hanya sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang memungkinkan anak-anak merasa dihargai dan didengarkan secara penuh. Pendekatan ini menuntut relawan untuk memiliki kepekaan dan keterampilan interpersonal yang tinggi agar dapat merespon kebutuhan psikologis anak secara tepat dan membangun hubungan yang bermakna (Fischer, 2017; Puruhito, 2019).

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam penggunaan model komunikasi yang benar-benar melibatkan anak jalanan sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan. Banyak program yang masih menjalankan pendekatan top-down yang mengabaikan partisipasi anak jalanan dan komunitas sebagai agen perubahan. (Kurnia, 2020) menyoroti bahwa model komunikasi yang ada cenderung bersifat satu arah dan kurang mempertimbangkan keragaman kebutuhan serta aspirasi anak jalanan itu sendiri. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ashfar (2023) juga menegaskan bahwa pemberdayaan yang tidak melibatkan anak jalanan secara aktif dalam proses komunikasi berpotensi gagal dalam mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Komunitas Peduli Anak Jalanan Makassar (KPAJ) menerapkan komunikasi inklusif dalam membangun hubungan yang positif dengan anak-anak jalanan. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, relawan KPAJ menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang menekankan penghargaan terhadap anak-anak sebagai individu yang memiliki hak dan suara. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga pada bagaimana mengakui dan menghormati keberadaan mereka dalam proses pendidikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Alam dkk., 2021) dijelaskan bahwa prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, seperti empati, kejelasan, dan penghormatan, sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan dan rasa aman bagi anak-anak jalanan. Relawan berusaha untuk memahami kondisi psikologis dan sosial anak-anak ini, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendengarkan kebutuhan mereka. Pendekatan inklusif ini tidak hanya bertujuan untuk memberi mereka akses pendidikan, tetapi juga untuk membentuk konsep diri yang positif melalui interaksi yang membangun dan penuh perhatian.

Komunikasi inklusif secara khusus menekankan dialog terbuka, empati, dan penghormatan terhadap identitas serta pengalaman unik anak jalanan. Pendekatan ini sangat efektif dalam mengurangi rasa alienasi yang sering dialami oleh anak-anak jalanan, sekaligus membangun kepercayaan yang kokoh antara relawan dan anak jalanan. Melalui komunikasi yang inklusif, anak jalanan tidak hanya menjadi objek penerima pesan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pemberdayaan dan transformasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep komunikasi

sebagai proses sosial interaktif yang mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman pengalaman kelompok marjinal, sehingga mendukung perubahan perilaku dan integrasi sosial yang berkelanjutan (Asumosi, 2019; Corcoran, 2022; Hopkins, 2024; Rahmawati, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti aspek pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan bagi anak jalanan, kajian yang secara mendalam membahas penerapan komunikasi inklusif berbasis komunitas sebagai alat utama dalam transformasi perilaku anak jalanan masih sangat terbatas. Banyak program yang berfokus pada intervensi fisik dan sosial secara parsial tanpa memanfaatkan komunikasi sebagai proses sosial yang holistik. Fatimah (2018) menekankan bahwa tanpa integrasi komunikasi yang efektif, perubahan yang dicapai cenderung bersifat sementara dan kurang mampu menjawab kebutuhan psikologis serta sosial anak jalanan secara menyeluruh. (Wahdaniah, 2022) juga mengungkapkan bahwa pendekatan komunikasi yang masih minim partisipasi anak jalanan dan komunitas berdampak pada rendahnya keberlanjutan program pemberdayaan.

Kesenjangan ini menjadi usaha sekaligus kesempatan bagi peneliti untuk berkontribusi melakukan penelitian mengenai **“Analisis Strategi dan Peran Komunikasi Inklusif Dalam Transformasi Perilaku Anak Jalanan: Studi Kasus Pada Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi inklusif yang diterapkan oleh relawan dalam interaksi dengan anak jalanan di Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar?
2. Bagaimana peran komunikasi inklusif dalam mendukung transformasi perilaku anak jalanan di Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh relawan dalam menerapkan strategi komunikasi inklusif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi komunikasi inklusif yang diterapkan oleh relawan dalam interaksi dengan anak jalanan di Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis peran komunikasi inklusif dalam mendukung transformasi perilaku anak jalanan di Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh relawan dalam pelaksanaan strategi komunikasi inklusif.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang peran komunikasi inklusif dalam konteks pemberdayaan sosial anak jalanan. Penelitian ini juga membuka peluang studi lebih lanjut mengenai dinamika komunikasi interpersonal dalam interaksi relawan dan anak jalanan serta dampaknya terhadap transformasi perilaku.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam ranah komunikasi sosial dan komunikasi berbasis komunitas. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai strategi

komunikasi yang efektif dan responsif dalam konteks sosial budaya lokal, seperti yang terjadi di Kota Makassar.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini membantu relawan untuk memahami serta mengembangkan strategi komunikasi inklusif yang mampu membangun hubungan yang lebih empatik dan partisipatif dengan anak jalanan. Dengan demikian, proses pemberdayaan dan transformasi perilaku anak jalanan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, praktisi sosial, dan organisasi non-pemerintah dalam merancang program intervensi sosial yang lebih manusiawi, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan psikologis anak jalanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan dan pemberdayaan anak jalanan di tingkat lokal maupun nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Konsep

2.1.1 Strategi

Strategi dalam konteks manajemen didefinisikan sebagai kerangka kerja manajerial yang mencakup serangkaian keputusan dan tindakan terencana untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks (Alharbi, 2024). Dalam perkembangannya, strategi tidak lagi dipahami secara sempit sebagai rencana linier atau prediktif, tetapi sebagai proses adaptif yang terus berkembang seiring perubahan internal organisasi dan dinamika eksternal. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan pembelajaran organisasi agar mampu merespons tantangan dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Dalam organisasi nirlaba atau komunitas sosial seperti lembaga peduli anak jalanan, strategi memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan program dan efektivitas pencapaian misi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategis memungkinkan organisasi nirlaba merumuskan visi yang jelas, mengelola sumber daya secara efisien, serta beradaptasi terhadap ketidakpastian (Ulwiyah dkk., 2023). Tidak hanya untuk tujuan operasional, strategi dalam organisasi sosial juga diarahkan pada pencapaian nilai kemanusiaan, pemberdayaan, dan dampak sosial yang nyata (Judith Butler, 2011)

Konsep kapabilitas dinamis (*dynamic capabilities*) menjadi landasan penting dalam pemahaman strategi kontemporer, yakni kemampuan organisasi untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan eksternal melalui restrukturisasi internal, pengelolaan pengetahuan, dan inovasi (Dedi Purwana & Sofwan Effendi, 2024). Dalam konteks komunitas peduli anak jalanan, kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan sosial seperti meningkatnya urbanisasi, perubahan kebijakan sosial, atau krisis ekonomi menjadi kunci agar strategi tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan sasaran program secara efektif.

Manajemen strategi umumnya dibagi ke dalam tiga tahapan penting: perumusan strategi (*formulation*), implementasi strategi (*implementation*), dan evaluasi strategi (*evaluation*). Tahap perumusan berfokus pada analisis situasi dan penentuan arah organisasi; implementasi melibatkan penyusunan program kerja, distribusi peran, dan pelaksanaan taktis; sementara evaluasi bertujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari strategi yang dijalankan (Ahmad Rusdiana, 2020). Dalam lembaga sosial, seperti yang menangani isu anak jalanan, evaluasi tidak hanya menilai pencapaian kuantitatif, tetapi juga

perubahan kualitatif seperti peningkatan kesejahteraan psikososial dan reintegrasi sosial anak.

Penelitian tentang strategi di organisasi non-profit menunjukkan bahwa proses perencanaan strategis sebaiknya melibatkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Artinya, penyusunan strategi harus memperhatikan suara dari berbagai pemangku kepentingan, baik relawan, penerima manfaat, donatur, hingga mitra lokal, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kondisi riil dan kebutuhan komunitas (Anna-Leena Kero, 2024). Pendekatan ini memperkuat legitimasi sosial strategi dan meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan program. Integrasi antara strategi dan pembangunan berkelanjutan menjadi sorotan utama dalam literatur strategis modern. Strategi yang tidak hanya mengejar tujuan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim (Sedovs dkk., 2025).

2.1.2 Peran

Konsep “peran” dalam kajian sosial dan organisasi berakar pada *Role Theory*, yang memandang bahwa setiap individu yang menempati suatu posisi sosial atau jabatan dalam organisasi memiliki seperangkat ekspektasi perilaku, norma, hak, serta kewajiban yang melekat pada posisi tersebut (Wikipedia, 2023; Repository UINSU, 2023). Dalam konteks ini, peran tidak hanya dipahami sebagai label struktural, melainkan sebagai kerangka perilaku yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu (Fathul dkk., 2024). Hal ini menciptakan semacam pedoman sosial yang menuntun individu agar bertindak sesuai harapan kolektif, sehingga peran menjadi elemen penting dalam keteraturan sosial.

Dalam masyarakat maupun organisasi, peran memungkinkan interaksi yang stabil dan prediktabel, sebab setiap aktor sosial menjalankan fungsinya berdasarkan harapan sosial yang telah dikonstruksikan secara bersama (Kholis Hamdy dkk., 2024); Wikipedia, 2023). Dalam komunitas sosial seperti lembaga peduli anak jalanan, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran baik itu peran formal seperti koordinator lapangan, pengurus komunitas, dan relawan, maupun peran informal seperti pendamping, fasilitator, atau motivator. Ketika setiap aktor memahami batas dan tanggung jawab perannya, maka koordinasi dan implementasi program akan berjalan lebih lancar dan efektif.

Namun, teori peran juga mengungkap potensi kompleksitas yang muncul dalam praktik, seperti *role conflict* (konflik peran) dan *role ambiguity* (ketidakjelasan peran). Konflik peran terjadi ketika seorang individu harus menjalankan dua atau lebih peran dengan tuntutan yang bertentangan, misalnya relawan yang juga menjadi penerima manfaat dalam program yang sama (eprints.iainu-kebumen.ac.id, 2023; Etheses UIN Syekh Wasil Kediri, 2023). Ketika ekspektasi terhadap peran tidak sinkron atau tidak didefinisikan

dengan jelas, maka aktor sosial berisiko mengalami tekanan psikologis, kebingungan dalam bertindak, bahkan penurunan efektivitas kerja (Kholis Hamdy dkk., 2024; Repository UINSU, 2023).

Literatur tentang manajemen organisasi layanan manusia (*human service organization*) menyroti bahwa peran dalam organisasi sosial cenderung fleksibel dan kontekstual, artinya, satu peran bisa berubah bentuk tergantung pada kondisi sosial, kebutuhan penerima manfaat, dan dinamika lapangan (Fauzik Lendriyono, 2022); Darma Jaya Repository, 2023). Oleh karena itu, penting bagi organisasi sosial untuk secara berkala melakukan pemetaan dan redefinisi peran agar selaras dengan perkembangan program dan situasi masyarakat. Dengan pendekatan yang reflektif dan responsif terhadap perubahan, komunitas dapat memastikan bahwa distribusi peran tetap efektif dan berorientasi pada keberhasilan misi sosial mereka.

2.1.3 Komunikasi

Konsep komunikasi dalam ilmu sosial dan humaniora dipahami sebagai proses dasar interaksi manusia yang memungkinkan pertukaran informasi, gagasan, emosi, serta makna antarindividu maupun kelompok. Dalam kerangka ini, komunikasi tidak hanya dianggap sebagai proses mekanis pengiriman pesan, tetapi sebagai proses simbolik yang mencakup aktivitas encoding (pengkodean pesan), transmisi (pengiriman), decoding (pemahaman), dan interpretasi makna (Erven, 2021; pressbooks, 2024). Proses ini membentuk dasar dari kehidupan sosial manusia, di mana makna dibangun, dipertukarkan, dan dipahami secara bersama melalui simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi.

Komunikasi menjadi mekanisme utama pembentukan pemahaman bersama, pembentukan identitas kolektif, pengorganisasian tindakan sosial, serta koordinasi antara aktor sosial. Baik dalam level interpersonal, organisasi, hingga komunitas, komunikasi memungkinkan adanya kolaborasi dan konsensus sosial (Craig, 2017; Somdutt Tripathi, 2024). Dalam masyarakat majemuk dan dinamis, kemampuan untuk membangun komunikasi yang inklusif dan efektif menjadi aspek fundamental dalam menjaga kohesi sosial serta dalam pelaksanaan intervensi sosial berbasis komunitas.

Lebih lanjut, dalam pendekatan kontemporer, komunikasi dipahami sebagai proses transaksional yakni tidak satu arah, melainkan berlangsung secara timbal balik, di mana setiap pihak yang terlibat turut membentuk dan memaknai isi pesan. Komunikasi semacam ini menekankan peran aktif komunikan, bukan hanya sebagai penerima pasif, tetapi sebagai aktor yang ikut serta dalam pembentukan makna (pressbooks, 2024; Somdutt Tripathi, 2024). Keberhasilan komunikasi tidak hanya dinilai dari tersampainya pesan, tetapi dari kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan (Erven, 2021).

Komunikasi interpersonal adalah bentuk paling mendasar dan penting dalam menjalin relasi sosial. Komunikasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk: tatap muka, melalui telepon, maupun media digital. Melalui komunikasi

interpersonal, individu dapat menjalin empati, membentuk kepercayaan, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif (Somdutt Tripathi, 2024); Hailo, 2024). Sementara itu, dalam konteks komunitas atau intervensi sosial, dikenal konsep komunikasi partisipatif, yakni komunikasi yang mendorong keterlibatan semua aktor dalam menyuarakan pandangan, menyusun agenda bersama, dan menciptakan solusi kolektif (Irma Yusriani Simamora dkk., 2025)

Perspektif kontemporer juga menekankan bahwa komunikasi bersifat kontekstual dan dinamis dipengaruhi oleh budaya, struktur sosial, relasi kekuasaan, serta teknologi media yang digunakan. Artinya, komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial tempat komunikasi itu berlangsung (Hair, 2020); Media Penerbit Indonesia, 2023). Oleh karena itu, teori komunikasi modern berupaya menjelaskan bagaimana simbol dan makna dibentuk dan dinegosiasikan dalam berbagai konteks sosial, termasuk dalam masyarakat yang terdigitalisasi dan terfragmentasi secara budaya maupun ekonomi.

Dalam praktiknya, komunikasi memainkan peran strategis dalam upaya perubahan sosial, advokasi komunitas, serta pemberdayaan kelompok marginal. Dalam konteks intervensi sosial seperti perlindungan anak jalanan, misalnya, komunikasi menjadi alat untuk membangun kepercayaan, menciptakan ruang partisipatif, dan mengubah persepsi kolektif. Komunikasi yang bersifat dialogis, inklusif, dan responsif terhadap realitas lokal memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, karena mampu memfasilitasi terjadinya pemahaman bersama serta pengorganisasian aksi kolektif.

2.1.4 Komunikasi Sosial

Komunikasi sosial merujuk pada proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antarindividu atau kelompok dalam suatu masyarakat, dengan tujuan untuk mempengaruhi, membentuk, atau mempertahankan hubungan sosial, nilai, dan norma di dalamnya. Dalam konteks sosial, komunikasi bukan hanya sekadar proses pengiriman pesan, tetapi merupakan sarana untuk membangun dan memperkuat ikatan sosial, serta mengatur dinamika sosial dalam masyarakat. Komunikasi sosial mencakup berbagai bentuk komunikasi, mulai dari komunikasi interpersonal, kelompok, hingga komunikasi massa, yang semuanya memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial dan budaya (Science Direct, 2024).

Secara teoritis, komunikasi sosial dipahami sebagai suatu proses dua arah yang melibatkan interaksi antara komunikator dan komunikan, di mana pesan tidak hanya diterima begitu saja, tetapi juga diproses, ditafsirkan, dan direspon oleh penerima pesan. Proses ini memungkinkan terjadinya saling pengaruh antarindividu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, komunikasi sosial juga dapat mencakup komunikasi massa, yang menyebarkan pesan secara luas kepada audiens yang lebih besar, seperti dalam konteks kampanye sosial, penyuluhan, atau perubahan perilaku (Oxford Bibliographies, 2024).

Komunikasi sosial memiliki fungsi yang sangat luas dalam masyarakat. Salah satu fungsinya adalah sebagai alat untuk mempertahankan kohesi sosial, di mana komunikasi memungkinkan individu dalam masyarakat untuk berbagi pemahaman dan menyepakati norma serta nilai bersama. Sebagai contoh, dalam masyarakat pluralistik, komunikasi sosial memainkan peran penting dalam menciptakan ruang dialog yang inklusif dan memperkuat pemahaman antar kelompok dengan latar belakang yang berbeda, baik itu dalam hal agama, budaya, maupun sosial-ekonomi (Pressbooks, 2024).

Komunikasi sosial juga berperan dalam proses pengambilan keputusan kolektif, baik dalam skala kecil (misalnya dalam keluarga atau komunitas) maupun skala besar (misalnya dalam organisasi atau negara). Proses komunikasi yang efektif memungkinkan individu atau kelompok untuk berbagi informasi, mendiskusikan masalah, serta merumuskan kebijakan atau tindakan bersama yang menguntungkan seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, komunikasi sosial dapat menjadi alat untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemangku kepentingan (Research Gate, 2024).

Dalam kajian sosial, komunikasi sosial sering dipandang sebagai sarana untuk perubahan sosial. Melalui komunikasi sosial yang efektif, nilai-nilai sosial yang positif dapat disebarkan, dan norma baru yang mendukung kesejahteraan bersama dapat dibentuk. Komunikasi sosial juga dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, diskriminasi, atau ketidakadilan, dengan cara membangun kesadaran publik, menggerakkan aksi kolektif, dan memfasilitasi dialog antar kelompok yang memiliki kepentingan berbeda (Research Gate, 2024).

2.1.5 Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah rencana atau pendekatan yang disusun dengan tujuan untuk mengarahkan proses komunikasi menuju pencapaian tujuan tertentu, baik dalam konteks organisasi, perusahaan, maupun dalam program sosial dan intervensi masyarakat. Dalam konteks ini, strategi komunikasi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada bagaimana mengelola dan membangun hubungan yang efektif antara pengirim dan penerima pesan. Strategi komunikasi mencakup pemilihan media yang tepat, penentuan pesan yang akan disampaikan, dan pengelolaan waktu serta konteks untuk mencapai hasil yang diinginkan (science direct, 2024).

Pentingnya strategi komunikasi dalam konteks sosial terletak pada kemampuannya untuk membangun pemahaman bersama dan mendukung tercapainya tujuan bersama, baik dalam organisasi nirlaba, pemerintah, maupun kelompok masyarakat. Dalam kajian komunikasi sosial, strategi komunikasi berperan sebagai alat untuk memfasilitasi perubahan sosial, membangun hubungan, dan memengaruhi perilaku sosial. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya dipandang sebagai proses penyampaian pesan semata, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar seperti kesadaran

masyarakat, penguatan identitas, dan pembangunan sosial yang inklusif (Research Gate, 2024).

Salah satu konsep penting dalam strategi komunikasi adalah pemilihan kanal atau media yang tepat, yang disesuaikan dengan karakteristik audiens dan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Pemilihan media yang efektif memungkinkan pesan disampaikan dengan lebih jelas dan diterima dengan baik oleh audiens. Dalam hal ini, komunikasi digital dan media sosial menjadi pilihan yang semakin penting di era modern, di mana audiens lebih terhubung melalui platform-platform ini, seperti halnya dalam kampanye sosial atau perubahan perilaku (Oxford Bibliographies, 2024).

Strategi komunikasi juga melibatkan analisis konteks yang mendalam. Konteks sosial, budaya, dan politik mempengaruhi bagaimana pesan dikonstruksi dan diterima oleh audiens. Dalam hal ini, strategi komunikasi yang efektif harus mampu mengadaptasi pesan sesuai dengan dinamika yang ada, serta memperhatikan keragaman latar belakang audiens. Sebagai contoh, dalam program pemberdayaan anak jalanan, pesan yang disampaikan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak jalanan tersebut, sehingga dapat diterima dan memotivasi perubahan perilaku mereka secara positif (Pressbooks, 2024).

Di sisi lain, strategi komunikasi juga melibatkan perencanaan jangka panjang, di mana komunikasi tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk pencapaian tujuan sesaat, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya membangun hubungan jangka panjang antara organisasi dan audiensnya. Dalam konteks organisasi sosial, hal ini penting untuk memastikan bahwa audiens tidak hanya menerima pesan dalam jangka pendek, tetapi juga berkomitmen terhadap perubahan yang lebih luas dalam jangka panjang (Research Gate, 2024). Dengan demikian, strategi komunikasi dalam konteks sosial adalah pendekatan yang holistik, dinamis, dan sangat bergantung pada konteks serta karakteristik audiens yang terlibat. Untuk mencapai hasil yang efektif, strategi komunikasi memerlukan perencanaan yang cermat dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

2.1.6 Komunikasi Inklusif

Komunikasi inklusif merupakan pendekatan strategis dalam praktik komunikasi yang berupaya memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, memiliki akses setara terhadap proses pertukaran informasi dan makna. Pendekatan ini menolak praktik komunikasi yang bersifat eksklusif atau diskriminatif, dan sebaliknya menekankan pentingnya menciptakan ruang dialog yang menghargai keragaman identitas, latar belakang, dan kondisi sosial penerima pesan (Celia Trixie Gani, 2023; smowl.net, 2023). Komunikasi inklusif tidak hanya dilihat dari bagaimana informasi dikirimkan, tetapi juga bagaimana informasi dipahami, ditanggapi, dan dirasakan secara adil oleh setiap orang dalam konteks interaksi sosial.

Dalam konteks sosial, pendidikan, dan organisasi pelayanan publik, komunikasi inklusif memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan akses informasi. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi inklusif dapat menjembatani hambatan partisipasi, terutama bagi kelompok dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas atau masyarakat marginal (Redaksi, 2025; Somdutt Tripathi, 2024). Penggunaan teknologi adaptif seperti text-to-speech, bahasa isyarat, dan materi visual yang mudah diakses memungkinkan terciptanya ruang komunikasi yang lebih adil, partisipatif, dan efektif. Hal ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh dan memberikan informasi secara setara.

Komunikasi inklusif menurut Carl R. Rogers, 1961, dalam *On Becoming a Person* (1961), menekankan pentingnya **empati** dan **keterbukaan** dalam proses komunikasi. Rogers berargumen bahwa untuk memahami perspektif orang lain, komunikator harus mendengarkan secara aktif dan dengan empati, tanpa adanya penghakiman. Keterbukaan dalam komunikasi juga mencakup kejujuran dan kesediaan untuk berbagi pemikiran serta perasaan secara terbuka. Prinsip ini sangat penting dalam menciptakan ruang komunikasi yang aman dan setara, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui. Selain itu, Rogers menekankan bahwa **kesetaraan dalam komunikasi** adalah hal yang sangat fundamental. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengarkan, tanpa ada pihak yang merasa lebih dominan atau lebih berhak untuk berbicara daripada yang lain. Dalam konteks komunikasi inklusif, hal ini memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai.

Dalam karya Judith Butler, 2011, Judith Butler mengembangkan konsep **performativity** yang menunjukkan bahwa identitas sosial seseorang terbentuk melalui tindakan dan interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam konteks komunikasi inklusif, prinsip ini mengharuskan penghormatan terhadap identitas individu, yang diberikan ruang untuk diekspresikan tanpa dibatasi oleh norma-norma sosial yang kaku. Komunikasi inklusif memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi sesuai dengan identitas mereka tanpa takut dihukum atau dikucilkan karena perbedaan. Selain itu, Butler menekankan **dekonstruksi norma sosial**, terutama yang berkaitan dengan gender, seksualitas, dan identitas. Ini membuka kesempatan untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih inklusif dan tidak terbatas pada ekspektasi sosial yang eksklusif atau normatif. Oleh karena itu, dalam komunikasi inklusif, penting untuk mengakui dan merayakan perbedaan, menghindari tekanan untuk mencapai keseragaman, dan menciptakan ruang di mana semua individu dapat berkomunikasi secara bebas sesuai dengan identitas mereka.

Edward T. Hall, 1989 dalam *Beyond Culture* mengungkapkan bahwa komunikasi sangat dipengaruhi oleh **konteks budaya**, baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Hall mengajukan pentingnya **kesadaran budaya**, di mana komunikator harus menyadari bahwa cara berkomunikasi seseorang dapat sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya mereka. Dalam komunikasi inklusif, kesadaran ini memungkinkan kita untuk mengakui dan

memahami perbedaan budaya yang ada dalam interaksi sosial. Hall juga menggarisbawahi perlunya **adaptasi komunikasi** terhadap konteks budaya yang berbeda, sehingga setiap individu dapat merasa diterima dan dimengerti, tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Penyesuaian ini mencakup pemahaman tentang penggunaan bahasa, simbol, dan bahasa tubuh yang sesuai dengan norma budaya masing-masing. Dengan menyesuaikan komunikasi dengan konteks budaya yang berbeda, kita dapat memastikan bahwa setiap individu dapat berpartisipasi dalam komunikasi dengan cara yang paling efektif dan nyaman bagi mereka.

Sementara itu, Nora McConnon, (1990) dalam *Interpersonal Communication: A Personal Skills Course* berfokus pada **aksesibilitas pesan** dalam komunikasi inklusif. McConnon mengajarkan bahwa pesan harus dirancang agar dapat diakses oleh semua pihak, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif. Komunikasi harus disusun dengan cara yang dapat dipahami oleh semua kalangan, termasuk kelompok marginal, untuk memastikan tidak ada yang terabaikan dalam proses pertukaran informasi. Selain itu, McConnon juga menekankan **sensitivitas terhadap keragaman** dalam penggunaan bahasa, yaitu menghindari istilah atau bahasa yang bisa merendahkan atau menstereotipkan kelompok tertentu. Penggunaan bahasa yang sensitif dan inklusif sangat penting agar tidak ada kelompok yang merasa terdiskriminasi atau tidak dihargai. Selain itu, prinsip **partisipasi aktif** juga menjadi bagian dari komunikasi inklusif menurut McConnon, di mana setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan terlibat dalam proses komunikasi secara setara, tanpa ada pihak yang merasa disisihkan. Prinsip ini memperkuat pentingnya partisipasi semua pihak dalam proses komunikasi untuk menciptakan ruang dialog yang adil dan inklusif.

Komunikasi inklusif memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, aspek aksesibilitas, di mana pesan dirancang agar dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, maupun literasi (proceeding.unram.ac.id, 2023). Kedua, sensitivitas bahasa, yang menuntut penggunaan istilah dan gaya komunikasi yang menghormati keragaman serta menghindari istilah yang bias, stereotipikal, atau merendahkan (Komunikasi Inklusif, 2023). Ketiga, prinsip partisipatif, yaitu memastikan semua pihak memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengarkan dalam proses komunikasi (UNICEF, 2019). Keempat, empati dan kesadaran inklusi, di mana komunikator memiliki sensitivitas terhadap keragaman penerima pesan dan menyesuaikan cara komunikasi dengan kondisi nyata mereka (Ylmaz, 2024).

Dalam pelaksanaannya, komunikasi inklusif menuntut adaptasi baik pada tingkat metode, medium, maupun strategi. Di komunitas atau organisasi sosial yang melayani kelompok rentan, seperti anak jalanan atau penyandang disabilitas. Penerapan komunikasi inklusif menuntut penggunaan bahasa sehari-hari, media visual sederhana, serta saluran umpan balik yang memungkinkan penerima pesan menyampaikan opini atau kritik (ejournal.iainata.ac.id, 2024). Penerapan pendekatan ini telah terbukti

meningkatkan partisipasi aktif, membangun rasa memiliki, serta memperkuat kepercayaan antara komunitas dan aktor intervensi sosial.

Komunikasi inklusif juga menciptakan fondasi bagi terbentuknya ruang sosial yang inklusif, yakni ruang yang mendorong keterlibatan semua orang dalam proses sosial, ekonomi, dan budaya secara setara. Dalam berbagai studi kasus, pendekatan ini telah digunakan dalam kampanye advokasi hak anak, program literasi digital untuk lansia, maupun inisiatif kesadaran lingkungan yang melibatkan komunitas adat (Dinasti Rev, 2024). Komunikasi inklusif bukan hanya alat penyampai pesan, melainkan jembatan untuk membangun relasi sosial yang sehat, berbasis kepercayaan, dan berorientasi pada transformasi sosial.

Oleh karena itu, dalam dunia yang semakin plural dan kompleks, pendekatan komunikasi inklusif menjadi sangat relevan untuk diterapkan secara luas, baik dalam lingkup pendidikan, pemerintahan, maupun gerakan komunitas. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas komunikasi, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan partisipasi yang menjadi fondasi masyarakat demokratis. Dengan demikian, komunikasi inklusif bukan hanya sebuah metode, melainkan prinsip etis dan sosial yang membimbing proses interaksi antar manusia di berbagai konteks.

2.1.7 Transformasi

Transformasi, dalam lingkup sosial dan organisasi, menggambarkan proses perubahan yang menyentuh akar-akar struktur dan sistem, bukan sekadar perubahan kosmetik. Ia menyangkut pergeseran nilai-nilai dasar, norma sosial, pola interaksi, serta tatanan institusional yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, transformasi tidak hanya mempengaruhi perilaku individu, tetapi juga menata ulang relasi kuasa, cara berpikir, dan mekanisme sosial secara mendalam dan menyeluruh (Sosiologi Institut, 2023; Wikipedia, 2023). Perubahan ini bisa terjadi akibat dinamika internal masyarakat maupun sebagai respons terhadap tekanan eksternal seperti globalisasi, krisis sosial, atau kemajuan teknologi.

Literatur kontemporer menyoroti bahwa transformasi sosial merupakan fenomena kompleks dan sistemik. Ia terjadi melalui interaksi multidimensi antara faktor ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan demografis yang saling mempengaruhi (De Haas dkk., 2022; Neliti, 2023). Kadang berlangsung perlahan dan berlapis seperti dalam proses modernisasi, namun dalam kondisi tertentu juga bisa terjadi secara cepat dan disruptif seperti pada revolusi sosial atau krisis struktural. Misalnya, munculnya teknologi digital telah mentransformasi cara masyarakat berinteraksi, bekerja, hingga membentuk identitasnya secara radikal.

Konsep transformasi juga sangat relevan dalam konteks komunitas marginal, seperti kelompok anak jalanan. Di sini, transformasi bukan sekadar memperbaiki kondisi ekonomi atau fisik, melainkan menyentuh aspek-aspek psikososial, termasuk rekonstruksi identitas, penguatan rasa percaya diri,

redefinisi peran sosial, dan pembentukan pola relasi baru dalam masyarakat (Ross, 2020; (Abu Bakar, 2016). Transformasi di level komunitas sering kali menjadi produk dari proses sosial yang panjang: mulai dari pemberdayaan, pendampingan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Proses transformasi ini umumnya mengikuti beberapa tahapan: diagnosis situasi awal, formulasi strategi intervensi, pelaksanaan program, dan konsolidasi hasil perubahan. Melalui tahapan ini, struktur sosial yang baru tidak hanya dibentuk, tetapi juga diinternalisasi dalam kesadaran kolektif komunitas (OUP Academic, 2023; IGI Global, 2023). Transformasi yang berhasil bukan hanya menciptakan kondisi baru secara fisik atau administratif, tetapi mampu mengubah cara pandang, nilai, serta budaya yang melekat pada suatu komunitas. Dalam banyak kasus, proses ini tidak lepas dari pendekatan kolaboratif dan reflektif agar perubahan benar-benar berakar dan berkelanjutan.

Transformasi sosial dipahami sebagai proses kolektif, bukan kerja individu atau elite semata. Upaya ini menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan: komunitas lokal, organisasi sosial, institusi pemerintah, hingga lembaga keagamaan atau pendidikan (UCSC Institute for Social Transformation, 2023). Dalam konteks pemberdayaan anak jalanan, misalnya, pendekatan transformatif harus mencakup aspek edukasi, perubahan persepsi publik, pembentukan sistem perlindungan yang holistik, serta pelibatan keluarga dan komunitas. Dengan kata lain, transformasi sejati hanya dapat terjadi jika ada kerja sama lintas sektor, dengan visi bersama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya.

2.1.8 Perilaku

Perilaku manusia dipahami sebagai bentuk nyata dari sikap, reaksi, dan tindakan seseorang terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan fisik maupun sosial. Konsep ini tidak hanya mencakup apa yang dilakukan oleh individu, tetapi juga alasan di balik tindakan tersebut, mencerminkan interaksi antara aspek psikologis, biologis, dan sosiokultural yang membentuk respon manusia terhadap situasi tertentu (IAIN Kediri, 2021). Dengan kata lain, perilaku merupakan ekspresi dari apa yang diyakini, dirasakan, dan dialami seseorang, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan baik yang bersifat individual maupun kolektif.

Dalam kajian ilmu sosial, perilaku menjadi kunci penting dalam memahami dinamika masyarakat. Perilaku sosial, yakni tindakan yang dipengaruhi atau diarahkan kepada orang lain sering menjadi indikator bagaimana norma dan struktur sosial berfungsi dalam komunitas (Ijmmu, 2022). Misalnya, perilaku kooperatif, empatik, atau bahkan destruktif dalam komunitas merupakan refleksi dari sistem nilai dan norma yang berlaku, serta peran struktur sosial dalam mengatur hubungan antarindividu. Oleh karena itu, perilaku tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat individu tersebut berada.

Pendekatan intervensi sosial modern memandang perilaku sebagai sesuatu yang dapat diubah dan dibentuk melalui strategi yang tepat. Perubahan

perilaku sering kali menjadi tujuan dari berbagai program pendidikan, penyuluhan kesehatan, atau kampanye sosial dengan asumsi bahwa perilaku bisa dimodifikasi bila terjadi perubahan dalam keyakinan, norma sosial, serta dukungan lingkungan (Repo Unand, 2020; Jurnal Universitas Pahlawan, 2021). Dalam hal ini, strategi komunikasi, modeling, reinforcement, dan penyediaan lingkungan yang mendukung sangat menentukan efektivitas perubahan perilaku.

Teori-teori psikologi perilaku membagi perilaku menjadi tiga aspek utama: kognitif (berkaitan dengan persepsi, keyakinan, dan pengetahuan), afektif (berkaitan dengan emosi, nilai, dan perasaan), serta konatif (berkaitan dengan niat dan aksi nyata). Pemahaman multidimensional ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang efektif tidak bisa hanya menasar pada tindakan lahiriah, tetapi juga perlu menyentuh aspek dalam diri individu, seperti bagaimana ia memandang suatu hal, merasakan sesuatu, dan membuat keputusan untuk bertindak (Poltekes Denpasar, 2021). Pendekatan holistik ini sangat penting dalam merancang strategi transformasi sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks komunitas peduli anak jalanan, pendekatan terhadap perubahan perilaku tidak cukup dengan memberi instruksi atau aturan baru. Diperlukan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana perilaku anak jalanan dibentuk oleh pengalaman hidup, tekanan sosial, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kasih sayang, serta normalisasi pola bertahan hidup di jalanan. Oleh karena itu, intervensi perilaku harus bersifat empatik, kontekstual, dan berbasis relasi sosial yang aman dan mendukung, agar anak mampu membentuk kembali persepsi diri dan mengembangkan perilaku yang lebih adaptif serta positif.

2.1.9 Anak Jalanan

Konsep “anak jalanan” merujuk pada anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau ruang publik, baik untuk bekerja, bermain, maupun bertahan hidup, sehingga menjadikan jalanan sebagai ruang kehidupan utama mereka (UNY Repository, 2021). Anak-anak ini umumnya berada di luar pengawasan orang tua secara intensif, dan sering kali harus menjalani kehidupan yang keras, penuh tantangan, dan berisiko tinggi (Demands for COP30, 2021). Menurut definisi nasional dan internasional, anak jalanan tidak hanya kehilangan hak atas perlindungan dan pendidikan, tetapi juga menghadapi kenyataan hidup yang seringkali sangat berbeda dari anak-anak lain seusia mereka (Mohamed dkk., 2018).

Dalam kajian akademik dan kebijakan, anak jalanan dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan kehidupan jalanan: (1) anak yang benar-benar hidup di jalanan tanpa tempat tinggal tetap; (2) anak yang bekerja di jalan, tetapi masih kembali ke rumah atau keluarga; dan (3) anak yang tinggal bersama keluarga di lingkungan jalanan atau kawasan informal (Mari Esterilita, 2022). Klasifikasi ini penting karena menentukan bentuk

intervensi yang paling tepat bagi masing-masing kategori. Misalnya, anak yang hidup sepenuhnya di jalanan membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding anak yang masih memiliki keterikatan rumah atau keluarga (Demands fot COP30, 2021).

Karakteristik anak jalanan sangat kompleks. Mereka umumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan, atau perlindungan hukum yang memadai (Mari Esterilita, 2022). Hidup di jalanan menempatkan mereka pada posisi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi seksual dan ekonomi, serta penyalahgunaan zat (UNY Repository, 2021). Anak-anak ini juga rentan mengalami gangguan psikologis akibat kurangnya rasa aman, stigmatisasi sosial, dan ketidakpastian masa depan (Demands fot COP30, 2021). Situasi ini menjadikan anak jalanan sebagai bagian dari kelompok sosial paling rentan dalam masyarakat modern (Mohamed dkk., 2018)

Implikasi sosial dari keberadaan anak jalanan mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem sosial dan perlindungan anak (Mari Esterilita, 2022). Banyak hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara dan masyarakat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengembangan diri tidak terpenuhi dalam realitas kehidupan mereka (Demands fot COP30, 2021). Oleh karena itu, intervensi terhadap anak jalanan tidak dapat hanya bersifat karitatif atau jangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang strategis, berkelanjutan, dan menyeluruh (Mohamed dkk., 2018).

Program intervensi berbasis komunitas menjadi salah satu solusi yang terbukti efektif dalam menangani persoalan anak jalanan. Pendekatan ini melibatkan rumah singgah, ruang komunitas, pelatihan keterampilan, konseling psikososial, dan penguatan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif (UNY Repository, 2021). Pendampingan yang bersifat holistik dan partisipatif terbukti mampu membuka peluang bagi anak jalanan untuk keluar dari siklus marginalisasi, serta membantu proses reintegrasi mereka ke dalam lingkungan sosial yang lebih aman dan mendukung (Mari Esterilita, 2022).

Keberhasilan program perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan sangat ditentukan oleh keterlibatan multiaktor, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia pendidikan, dan masyarakat luas (Mohamed dkk., 2018). Kesadaran kolektif tentang pentingnya hak anak dan partisipasi aktif dari komunitas lokal menjadi prasyarat utama dalam menciptakan perubahan sosial yang berdampak (Demands fot COP30, 2021). Oleh karena itu, isu anak jalanan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi menjadi tanggung jawab sosial bersama dalam menciptakan masa depan yang lebih adil dan manusiawi bagi setiap anak (UNY Repository, 2021).

2.1.10 Komunitas Peduli Anak Jalanan

Komunitas peduli anak jalanan merupakan bentuk solidaritas sosial yang tumbuh atas kesadaran kolektif untuk melindungi, mendampingi, dan memberdayakan anak-anak yang hidup di ruang publik. Komunitas ini dapat

berupa organisasi formal maupun non-formal yang menyelenggarakan intervensi sosial berbasis sukarela. Menurut Nurhadra Hajar Gosul, komunitas seperti ini "memegang peran signifikan dalam proses rehabilitasi sosial anak jalanan dengan pendekatan berbasis nilai-nilai kekeluargaan dan penguatan kapasitas individu" (Nurhadra Hajar Gosul, 2021). Tujuan utamanya adalah menciptakan ruang aman dan inklusif, mengembalikan hak-hak anak, dan memfasilitasi reintegrasi sosial yang bermartabat.

Komunitas hadir sebagai respons terhadap lemahnya sistem perlindungan negara terhadap anak jalanan, yang kerap mengalami kekerasan, eksploitasi, dan keterasingan sosial. Nurul Sa'adah menjelaskan bahwa "intervensi berbasis komunitas memungkinkan pendekatan holistik, tidak hanya menasar aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, psikososial, dan pembentukan konsep diri anak" (Suryadi dkk., 2020). Intervensi komunitas tidak bersifat karitatif belaka, melainkan berupaya mendorong transformasi berkelanjutan terhadap kualitas hidup anak jalanan.

Model intervensi yang digunakan komunitas ini umumnya mencakup tiga tingkatan: mikro (pendampingan individu dan keluarga), mezzo (program kelompok, pelatihan keterampilan, dan pendidikan alternatif), dan makro (advokasi kebijakan dan kemitraan lintas lembaga). Menurut hasil studi Atlantis Press, "model pemberdayaan komunitas untuk anak jalanan seharusnya mempertimbangkan semua lapisan intervensi sosial agar dapat berkelanjutan dan berdampak luas" (Natalia & Syamsi, 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan sistemik dalam mengatasi permasalahan anak jalanan yang kompleks dan multidimensi.

Pendidikan menjadi instrumen utama dalam pemberdayaan anak jalanan. Sebuah studi dari ResearchGate menyebutkan bahwa "pendidikan alternatif yang diberikan komunitas mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta harapan hidup anak jalanan" (Suryadi dkk., 2020). Komunitas menyediakan pendidikan nonformal, pelatihan vokasional, dan pembinaan moral agar anak jalanan memiliki bekal untuk mandiri secara sosial dan ekonomi. Tujuan akhirnya adalah merestorasi konsep diri dan memberdayakan anak sebagai aktor perubahan.

Keberhasilan komunitas juga sangat ditentukan oleh kualitas hubungan interpersonal antara pendamping dan anak. Studi dari UPI Bandung menegaskan bahwa "hubungan berbasis kepercayaan dan empati menjadi fondasi utama dalam proses pendampingan anak jalanan" (Herdiansyah dkk., 2025). Melalui kehadiran yang konsisten dan non-diskriminatif, anak-anak merasa dihargai dan diterima secara utuh, sehingga lebih terbuka dalam menjalani proses rehabilitasi.

Komunitas bekerja lintas sektor dengan melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah daerah. Nurhadra Hajar menyatakan bahwa "diperlukan kerja lintas aktor agar perlindungan anak jalanan tidak berjalan parsial dan mampu mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan" (Suryadi dkk., 2020). Kolaborasi ini memperluas jangkauan, memperkuat legitimasi

program, dan menciptakan ekosistem sosial yang mendukung pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

2.2. Kajian Teori

2.2.1 Teori Interaksi Simbolik

Teori Interaksi Simbolik (*symbolic interactionism*) menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk secara aktif oleh individu melalui proses interaksi simbolik sehari-hari. Simbol-simbol seperti bahasa, gestur, dan ekspresi perilaku menjadi alat utama dalam menciptakan makna yang disepakati bersama dalam masyarakat (Blumer, 1969). Dalam pendekatan ini, makna tidak bersifat tetap atau melekat pada objek, melainkan dikonstruksi melalui proses sosial yang terus berubah berdasarkan interaksi antarindividu (Mead, 1934). Artinya, manusia bertindak terhadap objek atau fenomena bukan berdasarkan sifat objek itu sendiri, tetapi berdasarkan makna yang dikonstruksikan secara sosial melalui komunikasi simbolik.

Proses pemberian makna dalam teori ini berawal dari interaksi dan terus berkembang melalui interpretasi berulang. Individu mengembangkan pemahaman mereka atas sesuatu melalui percakapan dan tindakan simbolik yang berlangsung dalam lingkungan sosialnya (Basrowi, 2021). Misalnya, identitas "anak jalanan" bukan sekadar label deskriptif, tetapi hasil konstruksi sosial yang muncul dari interaksi mereka dengan masyarakat, media, lembaga sosial, dan pengalaman hidup sehari-hari. Dengan demikian, makna tersebut sangat bergantung pada konteks sosial, nilai-nilai dominan, dan relasi kuasa yang melingkupinya.

Salah satu aspek utama teori ini adalah konsep "self" atau diri yang terbentuk melalui proses "looking-glass self" individu membentuk konsep dirinya berdasarkan bagaimana mereka berpikir orang lain memandang mereka (Mead, 1934). Identitas menjadi hasil negosiasi antara persepsi diri dan persepsi sosial dalam interaksi yang berulang. Dalam konteks anak jalanan, mereka mungkin mulai membangun citra diri berdasarkan bagaimana mereka diperlakukan oleh masyarakat, apakah sebagai ancaman, korban, atau subjek yang layak diberdayakan. Proses pembentukan identitas ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi dalam komunitas mereka maupun dengan aktor eksternal seperti relawan dan lembaga sosial.

Teori ini juga sangat kontekstual dalam menjelaskan perubahan perilaku. Melalui interaksi sosial yang baru dan lebih inklusif, anak jalanan dapat menerima simbol dan makna baru yang mendorong mereka mengubah persepsi tentang diri, masa depan, dan lingkungan mereka. Menurut (Fajri, 2023), interaksi simbolik yang sehat, misalnya melalui program pendampingan yang partisipatif dapat membantu subjek membangun identitas positif, menginternalisasi nilai sosial yang konstruktif, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap komunitas. Oleh karena itu, perubahan perilaku yang tampak dari luar

sebenarnya adalah refleksi dari proses internalisasi simbol sosial baru dalam diri anak-anak tersebut.

222 Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses transformasi yang mencakup perubahan dalam struktur sosial, norma, nilai, pola perilaku, dan institusi dalam suatu masyarakat seiring waktu (Encyclopedia Britannica, 2023; Social Sci LibreTexts, 2023). Perubahan ini bisa bersifat mikro maupun makro, dan dapat terjadi secara gradual maupun revolusioner tergantung pada faktor-faktor pendorong dan resistensi sosial yang terlibat (Effendy, 2021). Dalam kerangka ini, perubahan sosial tidak dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang mencerminkan dinamika adaptasi masyarakat terhadap berbagai tantangan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan sosial menjadi krusial dalam upaya merancang intervensi sosial yang tepat dan kontekstual.

Teori-teori klasik dalam sosiologi menjelaskan mekanisme perubahan sosial dari sudut pandang yang berbeda. Karl Marx, misalnya, menekankan bahwa perubahan sosial digerakkan oleh konflik kelas dan pertentangan dalam relasi produksi, di mana perjuangan antara kaum borjuis dan proletar menjadi motor transformasi struktural (Ritzer, 2019). Sebaliknya, Émile Durkheim melihat perubahan sosial sebagai respons adaptif terhadap pergeseran fungsi dalam struktur sosial. Dalam pendekatan fungsional, perubahan dibutuhkan agar masyarakat tetap mampu mempertahankan keseimbangan dan integrasi sosial dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern (Puspitasari, 2020). Sementara itu, Max Weber menambahkan bahwa perubahan sosial juga dapat terjadi melalui perubahan nilai, motivasi individu, dan tindakan rasional yang berbasis pada kesadaran baru (Ritzer, 2019).

Dalam perkembangan teori sosiologi modern, perubahan sosial tidak lagi hanya dipandang dari aspek struktural atau konflik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kultural, ideologis, dan teknologi. Faktor-faktor seperti globalisasi, modernisasi, kemajuan teknologi digital, pergeseran demografi, serta krisis lingkungan menjadi elemen penting yang mempercepat transformasi sosial dalam berbagai sektor kehidupan (Puspitasari, 2020). Bahkan, perubahan politik dan kebijakan publik dapat memicu perombakan institusional yang berdampak pada norma sosial dan sistem kekuasaan (Effendy, 2021). Konteks ini menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat multikausal dan kompleks, tidak bisa direduksi pada satu faktor tunggal.

Salah satu dimensi penting dalam perubahan sosial masa kini adalah peran media dan komunikasi. Komunikasi bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membentuk persepsi, mengarahkan opini publik, serta membangun norma dan kesadaran baru di tengah masyarakat (Wibowo, 2022). Melalui komunikasi interpersonal, komunitas, dan media massa, termasuk media digital, ide-ide progresif dapat disebarluaskan dan dimobilisasi secara kolektif. Di sinilah letak

pentingnya komunikasi sebagai katalisator perubahan sosial, karena ia membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyuarkan aspirasi dan membentuk makna sosial bersama (Ulwiyah dkk., 2023).

223 Teori Konstruktivisme Sosial

Teori konstruktivisme sosial menekankan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang bersifat objektif dan universal, melainkan hasil dari proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya (Nugroho, 2021). Pandangan ini menolak gagasan bahwa individu memperoleh pengetahuan secara pasif, dan sebaliknya menyatakan bahwa makna dibentuk melalui diskusi, refleksi, dan keterlibatan aktif dalam konteks sosial-kultural tertentu (Zubaidah, 2020). Oleh karena itu, konstruktivisme sosial menganggap pembelajaran sebagai kegiatan kolaboratif yang kontekstual dan dinamis. Pengetahuan pun tidak dilihat sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai hasil interpretasi yang bisa berubah sesuai dengan pengalaman sosial dan dialog antaranggota masyarakat.

Landasan pemikiran konstruktivisme sosial banyak dipengaruhi oleh Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif manusia (Vygotsky, 1978). Vygotsky memperkenalkan konsep bahwa alat-alat budaya seperti bahasa berperan sebagai medium berpikir dan membangun makna. Bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai budaya dan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam kerangka ini, pengetahuan dan identitas individu terbentuk secara aktif melalui interaksi dengan orang lain yang lebih berpengalaman, sehingga proses belajar tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya (Bruner, 1996).

Salah satu konsep penting dalam teori ini adalah *Zone of Proximal Development* (ZPD), yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan oleh individu secara mandiri dan apa yang bisa dicapai melalui bantuan orang lain (Vygotsky, 1978). Konsep ini menunjukkan bahwa potensi seseorang dapat berkembang secara optimal ketika ada pendampingan sosial, baik dari guru, teman sebaya, maupun komunitas yang mendukung. Dalam praktiknya, ZPD menjadi dasar dari pendekatan belajar yang kolaboratif dan partisipatif, di mana lingkungan belajar diorganisasi agar terjadi interaksi yang mendalam dan bermakna. Hal ini menjadikan komunitas atau kelompok sosial sebagai aktor penting dalam proses konstruksi pengetahuan (Law, 2022).

Teori konstruktivisme sosial juga menekankan bahwa proses pembelajaran adalah dinamis dan tidak pernah final. Artinya, pengetahuan yang dimiliki individu senantiasa dapat diperbarui, direkonstruksi, atau bahkan dipertanyakan kembali melalui pengalaman baru dan interaksi yang berbeda (Zubaidah, 2020). Dalam era digital saat ini, konstruktivisme sosial sangat relevan karena memungkinkan pemaknaan yang fleksibel terhadap informasi yang beredar luas melalui media sosial, platform pembelajaran daring, dan ruang diskusi interaktif. Teknologi menjadi alat baru dalam membentuk makna

secara kolektif dan memediasi pengalaman belajar yang lebih kompleks dan kaya (Law, 2022).

2.3 Penelitian Terdahulu/ *Literatur Review*

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam sebuah penelitian, karena memberikan gambaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada, dengan mempelajari penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami tren, metodologi, dan temuan yang relevan, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan bermakna. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu memastikan bahwa penelitian baru tidak hanya mengulang penelitian yang sudah ada sebelumnya, tetapi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang ilmu tersebut.

Kajian terhadap tren penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam studi tentang komunikasi dan anak jalanan. Pertama, terdapat kecenderungan untuk menempatkan anak jalanan sebagai subjek aktif dalam proses komunikasi, bukan sekadar objek intervensi. Davies (2023) mengindikasikan pentingnya mengakui agensi anak jalanan dan melibatkan mereka dalam desain dan implementasi program yang ditujukan untuk mereka. Kedua, terdapat tren untuk mengintegrasikan pendekatan komunikasi partisipatif dalam program pemberdayaan anak jalanan. (Rahmawati, 2023) mengungkapkan bahwa model komunikasi yang mengedepankan partisipasi aktif anak jalanan telah menunjukkan hasil yang lebih berkelanjutan dibandingkan model komunikasi top-down tradisional. Ketiga, terdapat pengakuan yang semakin kuat terhadap peran komunitas sebagai mediator dan fasilitator dalam proses komunikasi antara anak jalanan dengan masyarakat luas dan pemangku kebijakan. (Stewart, 2024) menyoroti bahwa komunitas yang bekerja dengan anak jalanan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang memperkuat suara anak jalanan dalam ruang publik. Keempat, terdapat penekanan pada pentingnya memahami komunikasi dalam konteks budaya dan sosial yang spesifik. Penelitian terkini oleh (Rahman, 2024) menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif untuk anak jalanan perlu disesuaikan dengan konteks budaya, sosial, dan ekonomi lokal dimana mereka berada.

Kelima, terdapat minat yang berkembang untuk mengeksplorasi peran teknologi digital dalam memfasilitasi komunikasi inklusif dengan anak jalanan. (Mitchell, 2023) mengungkapkan potensi penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana untuk memperkuat suara anak jalanan dan membangun kesadaran publik terhadap isu-isu yang mereka hadapi. Keenam, terdapat pengakuan terhadap pentingnya pendekatan komunikasi yang trauma-informed dalam bekerja dengan anak jalanan. (Hopkins, 2024) menekankan bahwa komunikasi dengan anak jalanan perlu memperhatikan potensi trauma yang mereka alami dan mengembangkan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi tersebut. Ketujuh, terdapat perhatian yang semakin besar terhadap isu etika dalam komunikasi dengan anak jalanan. (Watson, 2023) mengingatkan pentingnya menghormati privasi, martabat, dan hak anak jalanan dalam setiap proses komunikasi dan penelitian yang melibatkan mereka.

Kedelapan, terdapat tren untuk mengembangkan indikator dan metode evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengukur efektivitas intervensi komunikasi dalam konteks anak jalanan. (Gutiérrez, 2024) mengusulkan framework evaluasi yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga pada transformasi sistem dan struktur yang mempengaruhi kehidupan anak jalanan.

Beberapa tulisan tentang fenomena anak jalanan makassar antara lain *Street Children Phenomenon in Makassar City : A Criminological Analysis* (Nur Fadhilah Mappaselleng, 2021), tulisan ini membahas faktor-faktor penyebab fenomena anak jalanan di kota Makassar dan menekankan perlunya kebijakan pembangunan sosial dan pemberantasan kemiskinan untuk mencegah lebih banyak anak muda menjadi terpinggirkan. *Self Representation of Female Street Children in Makassar City* (Sifra dkk., 2023), membahas tentang representasi diri anak jalanan perempuan di kota Makassar. Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembinaan Anak Jalanan (Marif, 2022) membahas tentang implementasi peraturan yang bertujuan memberikan perlindungan dan bimbingan bagi anak-anak jalanan tunawisma, pengemis, dan pedagang.

Street Child Management Policy at Social Office of Makassar City, Indonesia (Solong dkk., 2023), membahas tentang kebijakan manajemen anak jalanan di Kota Makassar. Fenomena Anak Jalanan di Kota Makassar dan Problematika yang dihadapi (Almaida dkk., 2023), mengeksplorasi penyebab, tatanan hidup dan kerentanan anak jalanan di Makassar. *Communication Behaviour of Street Children and Beggars in Makassar* (Bahfiarti, 2019) pembahasannya menekankan pada perilaku komunikasi verbal dan non-verbal. Kehidupan Sosial Anak Jalanan di Kota Makassar (Kamrin, 2022), pembahasannya fokus pada fenomena kehidupan anak jalanan yang sangat miskin dan membutuhkan perawatan yang sistematis dan ditargetkan.

Street Childrens Tactics Against Oppressive Practices in Makassar (Abu Bakar, 2016), membahas tentang penolakan praktik penindasan melalui taktik berdasarkan kelangsungan hidup ekonomi. *Smoking Behaviours of Street Children in Makassar Indonesia* (Amiruddin dkk., 2015) membahas tentang kebiasaan merokok anak jalanan. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Hidayah, 2020) membahas tentang penerapan kebijakan. *'Maqashid Al-Sharia' Perspective for Character Building Among Street Children in Makassar* (Ipandang, 2015), membahas tentang pembangunan karakter untuk anak jalanan dengan fokus pada pembinaan nilai-nilai dan pendidikan spiritual dan *Cross Sectional Study to Assess the Personal Hygiene Habits and Knowledge of Street Children in the Final Waste Disposal Site in Manggala District, Makassar City* (Darwis, 2024) membahas faktor-faktor yang terkait dengan kebersihan pribadi anak jalanan.

Lebih spesifiknya, kajian tentang anak jalanan di Kota Makassar juga pernah dilakukan dengan mengambil Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) sebagai objek penelitian.

231 Peran Komunitas Peduli Anak Jalanan dalam Pembentukan Konsep Diri Anak Jalanan Di Kota Makassar

Penelitian ini membahas peran Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam pembentukan konsep diri anak jalanan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan melibatkan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAJ berfokus pada empat aspek utama: bimbingan agama Islam, pembinaan karakter, pendidikan umum, serta pengembangan minat dan bakat. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya tenaga pengajar, kesulitan dalam membentuk karakter anak jalanan yang terbiasa dengan lingkungan keras, serta hambatan dalam menarik minat mereka untuk belajar.

232 Strategi Komunitas Peduli Anak Jalanan Dalam Membangun Motivasi Belajar Anak Jalanan Di Kota Makassar

Penelitian ini membahas mengenai strategi yang diterapkan oleh Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) di Makassar dalam membangun motivasi belajar anak-anak jalanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan berfokus pada motivasi belajar dan pendidikan karakter, yang diterapkan melalui pendekatan yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAJ Makassar berhasil meningkatkan motivasi belajar anak jalanan melalui pendekatan pada keluarga, menyesuaikan model pembelajaran dengan minat dan bakat anak, serta pemberian apresiasi. Program Back to School dan pendidikan karakter juga menjadi kunci dalam membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan meraih potensi mereka.

233 Pertukaran Sosial Dalam Komunikasi Pembelajaran Efektif Pengajar Terhadap Anak Jalanan Pada Komunitas Peduli Anak Jalanan

Artikel ini membahas komunikasi pembelajaran efektif dalam konteks anak jalanan yang dilaksanakan oleh Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori pertukaran sosial menjadi dasar analisis, dengan menyoroti lima prinsip komunikasi efektif: respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pengajar dan anak jalanan, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi anak dalam pembelajaran. Hasilnya mencerminkan pentingnya komunikasi yang inklusif dan empatik dalam mendukung pendidikan anak jalanan, serta memberikan dampak positif dalam pengembangan diri mereka.

2.4 Kerangka Pikir

Fenomena anak jalanan merupakan masalah sosial yang kompleks dan berhubungan erat dengan marginalisasi sosial, eksploitasi, dan terbatasnya akses

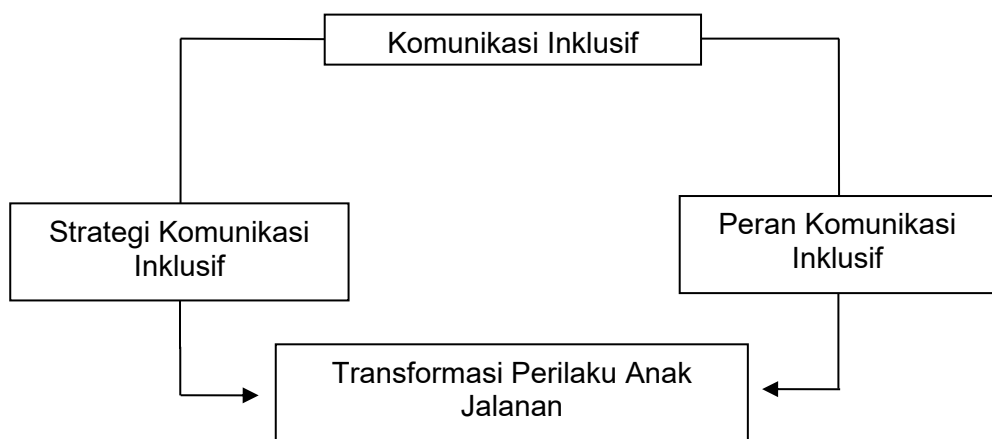
terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam upaya untuk memberdayakan dan memfasilitasi reintegrasi sosial anak jalanan, komunikasi memainkan peran kunci dalam mendukung perubahan perilaku mereka. **Komunikasi inklusif**, yang mengutamakan partisipasi aktif, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman, dapat menjadi sarana penting dalam mengatasi tantangan sosial dan psikologis yang mereka hadapi.

Anak jalanan sering terpinggirkan dalam masyarakat, dan komunikasi dengan mereka sering kali penuh dengan kesalahpahaman dan kesulitan karena stigma sosial yang melekat pada mereka. Dalam konteks ini, penting untuk menggali bagaimana komunikasi inklusif, yang berfokus pada pemberdayaan anak jalanan dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses perubahan sosial, dapat menjadi solusi efektif untuk merubah perilaku mereka yang lebih positif. Dengan mengadopsi prinsip komunikasi inklusif, relawan dan komunitas dapat menciptakan ruang bagi anak jalanan untuk menyuarakan pengalaman dan aspirasi mereka, yang akan mengurangi alienasi dan memperkuat rasa kepercayaan diri mereka.

Kota Makassar, sebagai kota dengan dinamika sosial dan budaya yang kaya, memberikan konteks yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana **komunikasi inklusif** dapat diterapkan dalam pemberdayaan anak jalanan. Keberagaman sosial dan budaya di Makassar membuka peluang untuk memahami bagaimana anak jalanan, yang datang dari latar belakang yang berbeda, merespon komunikasi inklusif dan bagaimana hal tersebut berperan dalam transformasi perilaku mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan bagaimana komunikasi yang adaptif terhadap konteks lokal dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan dan reintegrasi sosial anak jalanan.

Untuk itu, diperlukan sebuah **kerangka pemikiran** yang dapat menggambarkan peran komunikasi inklusif dalam mengubah perilaku anak jalanan di Kota Makassar. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana komunikasi yang berbasis pada nilai inklusivitas, penghargaan terhadap perbedaan, dan empati dapat menjadi faktor kunci dalam mendukung proses pemberdayaan sosial dan perubahan perilaku anak jalanan yang lebih berkelanjutan.

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran





Faktor Pendukung dan Penghambat

Sumber : Peneliti 2025